

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administratif Kabupaten**

##### **Pulau Morotai**

Kabupaten Pulau Morotai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahelar Utara (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008),. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pemekran dari Kabupaten Halmahera Utara.

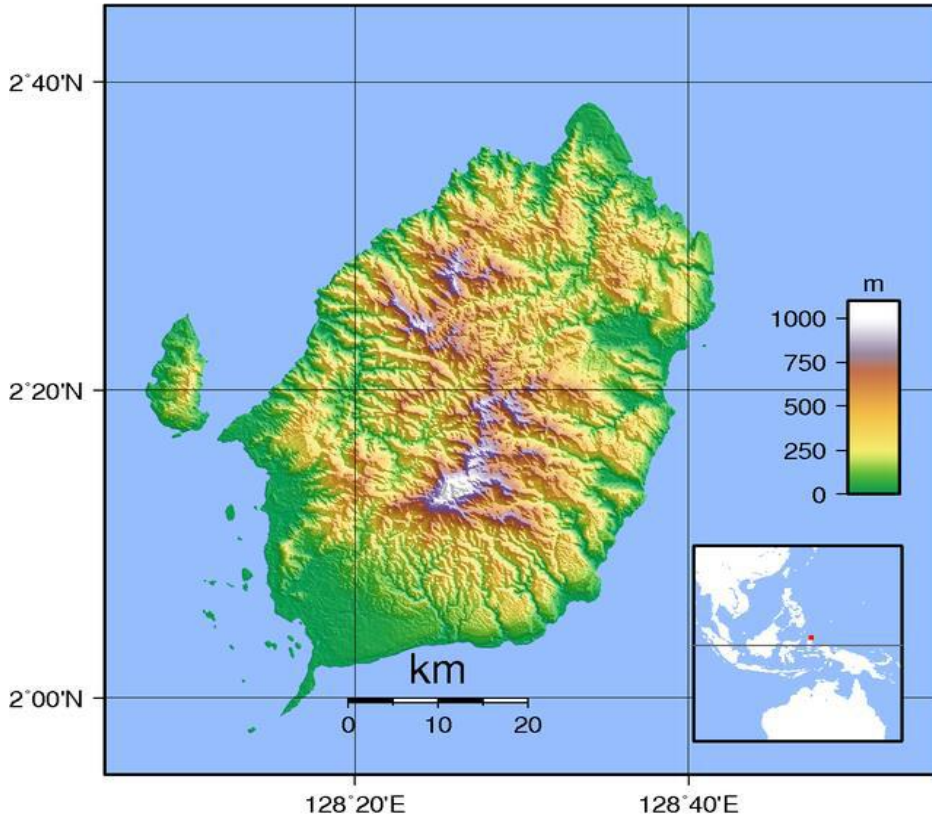
Secara administratif Kabupaten Pulau Morotai dibagi menjadi lima (5) kecamatan dengan 88 desa dengan luas wilayah keseluruhan adalah 2.314,90 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Pulau Morotai adalah:

- Sebelah Utara : Samudera pasifik, Laut Halmahera
- Sebelah Timur : Laut Halmahera
- Sebelah Selatan : Selat Morotai
- Sebelah Barat : Laut Sulawesi, Laut Halmahera

Dengan luas wilayah keseluruhan 2.314,90 km<sup>2</sup>, 90% wilayah Pulau Morotai merupakan desa pesisir, sisanya 10% desa bukan pesisir. Pulau Morotai merupakan daerah yang masih alami dan menyimpan banyak kekayaan alam yang belum dikelola dan dikembangkan. Sedangkan grafis

wilayah administrasi Kabupaten Pulau Morotai dapat digambarkan pada peta 1 berikut:

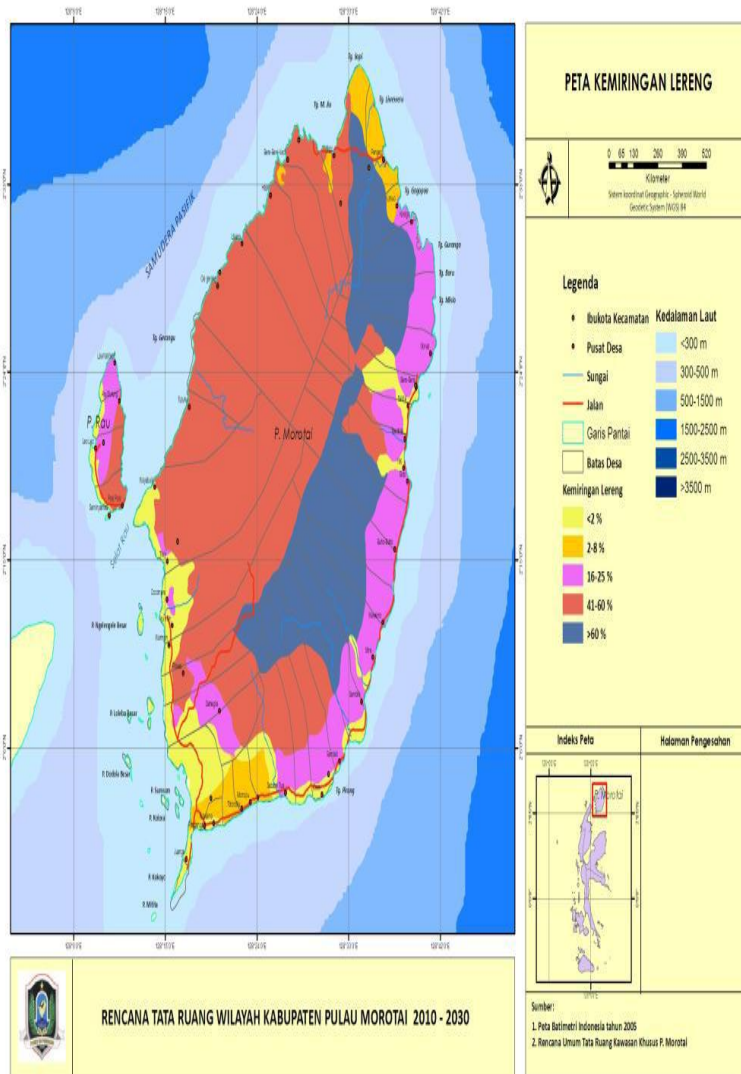
**Gambar 4.1 PETA WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**



*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai*

Selanjutnya akan di jelaskan Karakteristik Fisilk Kabupaten Pulau Morotai. Bentuk topografi Pulau Morotai terdiri dari dataran dengan kemiringan Laban yang terdiri dari Datar (0-3 %) seluas: ± 41.501,29 ha; Berombak (3-15 %) seluas: ± 32.316,57 ha; Berbukit (15-40 %) seluas: ±

54.586,67 ha dan Bergunung > 40 % seluas: ± 99.032,97 ha, adapun jenis tanah yang dimiliki sebagian besar merupakan tanah aluvial dan kombisol.



Secara Geografis, Kabupaten Pulau Morotai memiliki posisi strategis baik dari aspek geopolitik maupun geostrategis, karena posisi Morotai sebagai daerah perbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, yang memiliki gejala

pertumbuhan negara-negara di kawasan pasifik yang relatif tinggi dan merupakan jalur perdagangan antar negara dan antar benua, sehingga Pulau Morotai menjadi kawasan yang memiliki peluang sekaligus ancaman bagi pengembangan kawasan.

Kabupaten Pulau Morotai sebagai kabupaten kepulauan yang mencirikan gugusan pulau-pulau, dengan luas laut yang lebih besar dari luas daratan memberikan implikasi bagi pola pemukiman penduduk yang berada di bawah 500 dpl sebanyak 89% desa, sebagai desa pesisir, yang memiliki potensi Sumber daya alam yang cukup melimpah, baik di sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan maupun potensi Pariwisata sejarah terutama tempat-tempat sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah.

## **4.2. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai**

### **A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada awalnya merupakan satu bagian Kepegawaian Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai saat Kabupaten Pulau Morotai

dimekarkan pada Tahun 2008 dari Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Dengan terbitnya Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapeda Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Bagian Kepegawaian Daerah berubah menjadi Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

## **B. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapeda Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Badan Kepegawaian merupakan unsure pendukung tugas Kepala Daerah, yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Dan Sekretaris Daerah.

## **C. Tugas Pokok**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian.

## **D. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

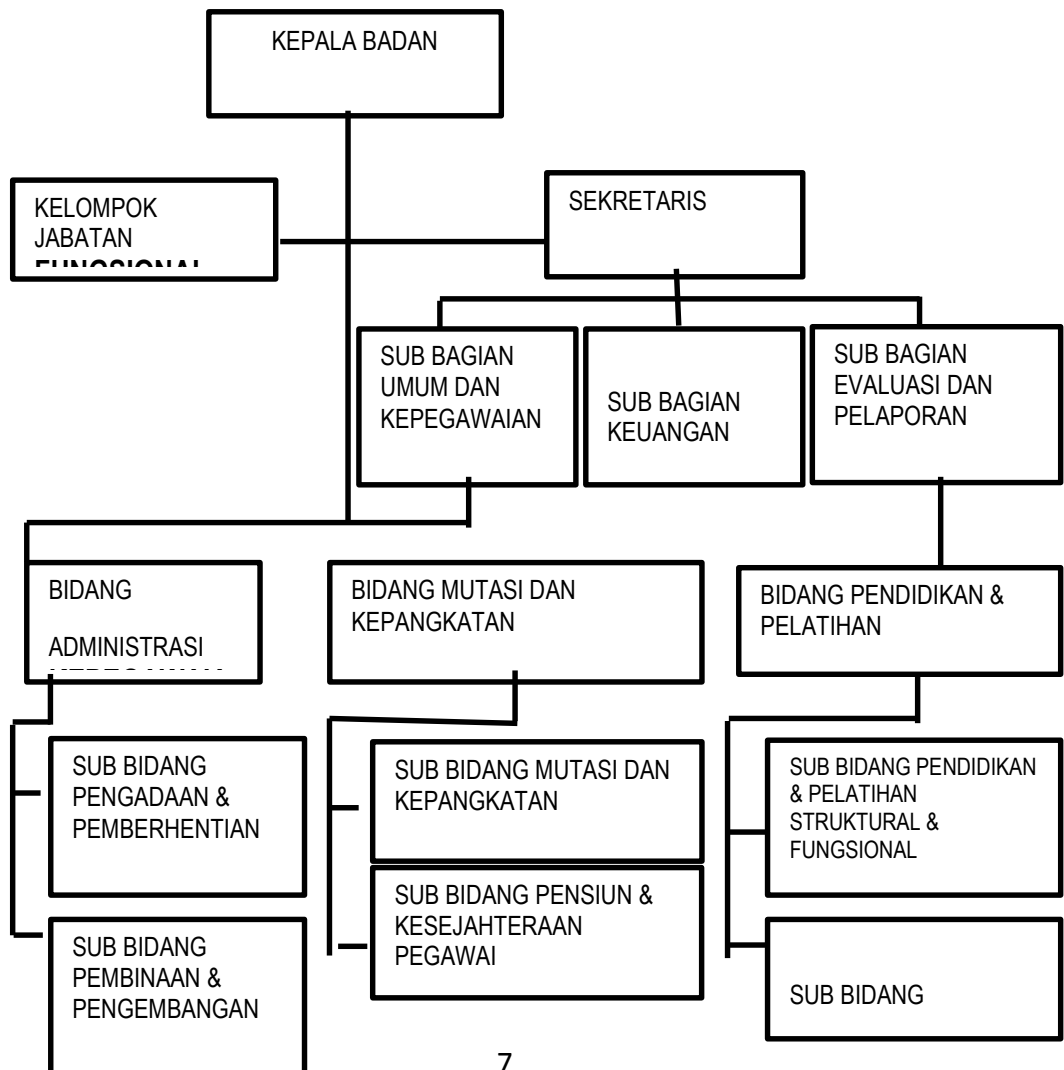
1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup dan tugasnya.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### G. Struktur dan Organisasi.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Membawahi
  - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
  - b. Sub, Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian evaluasi Dan Pelaporan
3. Bidang Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan membawahi :
  - a. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian.
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
4. Bidang Mutasi dan Kepangkatan membawahi :

- a.Sub. Bidang Mutasi Kepangkatan
- b.Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.
- 5.Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang membawahi :
  - a.Sub, Bidang Pendidkan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.
  - b.Sub. Bidang Pelatihan Teknis.
- 6.Kelompok jabatan dan fungsional

**Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah**



### 4.3 Sumber Daya SKPD

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebanyak 25 (dua puluh lima )orang dan pegawai tidak tetap PTT sebanyak 20 (dua puluh) orang merupakan sumber daya Badan Kepegawaian Daerah yang harus menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2016 yang berjumlah 2.235 PNS. **Tabel**

### 4.6 Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	-
2.	Sarjana	14
3.	D – III	1
4.	D – II	-
5.	D – I	8
6.	SLTA	2
7.	SLTP	-
	Jumlah	24



**Tabel 4.7 Komposisi PNS Menurut JabatanBadan Kepegawaian  
Daerah Kabupaten Pulau Morotai**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Sub. Bidang	3
5.	Kepala Sub. Bagian	2
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

### **Program dan Kegiatan**

No	Program	Kegiatan
1	Pengembangan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan komputer</li> <li>2. Pelatihan kepemimpinan</li> </ol>
2	Peningkatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar tentang pelayanan</li> <li>2. Penerapan pengawasan internal</li> </ol>

*Sumber Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai*

Sementara itu, dari hasil kajian teoritis dan landasan berpikir bahwa untuk membentuk kinerja paratur Sipil Negara ( ASN ) yang bersinergi dengan baik, tidak hanya dilakukan melalui proses perekrutan semata, tetapi juga dengan orientasi dan kebutuhan. Namun disamping itu juga perlu

dilakukan upaya pengembangan dengan melalui Pembinaan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Baik itu melalui jalur Pendidikan khusus yang sesuai dan juga Pelatihan yang bertujuan untuk mengarahkan kepada daya upaya peningkatan “Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat, Bangsa, Negara dan Tanah Air, Kompetensi Teknis Manajerial dan Kepemimpinannya serta Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya”, sudahsemenstinyaperludilakukansecaraintensifberkala. Agar proses perekrutan dan penempatan SumberDayaManusia tersebut bisaberjalan dan terkoodinasi denganbaik.

Dari Perkembangan terakhir berdasarakan Statistik Data yang dikeluarkan BPS tahun 2016, bahwa jumlah PNS Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.252 orang terdiri dari 1 orang berpendidikan SMP, 564 orang berpendidikan SMA, 550 orang berpendidikan DI/II, 216 orang berpendidikan Diploma III/Sarjana Mudadan 915 orang berpendidikan Sarjana/Doktor/Ph.d

## Visi dan Misi

- Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah Melalui Penataan Manajemen Kepegawaian yang Profesional Dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Berdaya Saing”

- Misi :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat akuntabel
2. Mewujudkan pencapaian karier PNS mulai CPNS sampai dengan pensiun
3. Menyediakan data dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang komprehensif dan kondusif
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta kesejahteraan PNS